

ABSTRACT

POLICY CAPACITY OF FISHING LIGHTING TOOLS IN LAMPUNG PROVINCE

BY

CINDY WENY SAGITA

Public policy is a series of actions taken by the government as a step to provide services to the community regarding problems faced to achieve certain goals. This effort was made to realize the capacity capacity of the fishing gear prohibition policy. This study aims to determine and analyze the capacity of the prohibition of fishing gear in Lampung can be categorized in superior policies because it has the capacity and to identify factors that influence policy capacity. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that the capacity to prohibit fishing gear refers to the superior policies of Riant Nugroho, namely policies that govern life together and ensure that shared life brings a common good, namely smart policy that describes the incompatibility between the KKP (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) policy and the fact In the field, prudent policies, namely decision makers to avoid mistakes and risk management, have not become important agenda in this policy, giving hope related to the impact of the policy by including political values because some regions have their own special features in implementing this policy. the factors that influence the extent of the policy include cooperation in team / team work, value creation / value creation, the principle of sustainability, consistency in implementation starting from the vision, mission, strategy, implementation and closure with control, using strong community strong state principles.

Keywords : *Public Policy, Capacity Policy, Superior Policy*

ABSTRAK

KAPASITAS KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT PENANGKAP IKAN DI PROVINSI LAMPUNG

BY

CINDY WENY SAGITA

Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berkenaan dengan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan di Lampung dapat dikategorikan dalam kebijakan yang unggul karena memiliki kapasitas dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kebijakan. Tipe penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkapan ikan mengacu pada kebijakan yang unggul Riant Nugroho yaitu kebijakan yang mengatur kehidupan bersama dan memastikan bahwa kehidupan bersama membawa kebaikan bersama yaitu kebijakan yang cerdas yakni menggambarkan ketidaksesuain antara kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dengan fakta dilapangan, kebijakan yang bijaksana yakni pengambil keputusan menghindarkan diri dari kesalahan serta manajemen resiko belum menjadi agenda penting dalam kebijakan ini, memberikan harapan berkaitan dengan dampak dari kebijakan tersebut dengan memuat nilai politik karena beberapa daerah memiliki keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan ini. faktor yang mempengaruhi kapiasitas kebijakan diantaranya kerjasama dalam team/ *team work*, pengkreasian nilai/ *Value Creation*, prinsip kesinambungan, konsistensi dalam penyelenggaraan mulai dari visi, misi, strategi, implementasi dan ditutup dengan pengendalian, menggunakan prinsip negara kuat masyarakat kuat.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kapasitas Kebijakan, Kebijakan Unggul